



# ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Erina Sudaryati<sup>1a</sup>

Toton Da'i Permana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya

<sup>a</sup>corresponding author: erina.sudaryati@feb.unair.ac.id

## INFO ARTIKEL

Histori Artikel:  
Tanggal Masuk 31 Januari  
2020  
Tanggal Diterima 30 Maret  
2020  
Tersedia Online 15 Mei 2020

### Keywords:

**Government Accounting Standards, Accrual Basis, Government Regulation No. 71 of 2010, East Java Provincial Forestry Service.**

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand and analyze the application of accrual-based Government Accounting Standards in aspects of Financial Statements, Human Resources, and Information Technology. The data collection technique was carried out by interview and documentary studies with leaders and employees of the financial sub-section of the East Java Provincial Forestry Service. The results showed that the East Java Provincial Forestry Service began to implement Accrual-based Accounting Standards for the 2015 fiscal year. Constraints faced were lack of time preparation, frequent application errors, some staff experiencing difficulties. In the period of 2016-2017 the development and development of Government Accounting Standards related Accrual HR was carried out intensely.*

### Kata Kunci:

**Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, PP No 71 tahun 2010, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur**

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam aspek Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumenter dengan pimpinan dan karyawan sub-bagian keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua untuk tahun fiskal 2015. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya persiapan waktu, kesalahan aplikasi yang sering, beberapa staf mengalami kesulitan. Pada periode 2016-2017 pengembangan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait SDM Akrua telah dilakukan secara intens.

## 1. Pendahuluan

Kebutuhan akan kualitas informasi yang baik dan good governance di Indonesia meningkatkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi dalam hal sistem pelaporan keuangan dengan landasan hukum UU No. 17 Tahun 2003. Reformasi keuangan diantaranya diwujudkan melalui adanya reformasi pada aspek penyediaan informasi keuangan yaitu berupa peralihan akuntansi pemerintahan berbasis kas menjadi akrual pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) yang berisi ketentuan bahwa jika basis akrual belum dapat diterapkan, maka institusi boleh menggunakan basis kas dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun mendatang, kemudian untuk memenuhi kebutuhan perubahan tersebut, pemerintah menindaklanjuti dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual guna menggantikan PP No. 24 Tahun 2005.

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menuai beberapa pertimbangan, hal ini disebabkan oleh selain adanya kebutuhan kualitas informasi dan good governance juga disebabkan adanya setiap kebijakan yang dibuat selalu mengandung dampak positif dan negatif, dampak tersebut diungkapkan sebagai kelebihan dan kekurangan dari suatu kebijakan. Berdasarkan pernyataan International Federation of Accountants (IFAC) kelebihan dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual ialah dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan pendanaan dan cara pemerintah membiayai aktivitasnya, menyediakan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai media evaluasi oleh pengguna laporan keuangan mengenai kemampuan pemerintah saat ini, dan memberikan informasi posisi keuangan pemerintah saat ini serta memberikan gambaran mengenai efektifitas dan efisiensi pemerintah dalam pencapaian program kerja atas penggunaan sumber daya yang di kelolanya sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdampak antara lain pada adanya perubahan regulasi tentang kebijakan akuntansi yang mengalami revisi, terjadi restatement neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perubahan sistem dan prosedur pelaksanaan APBD serta sistem informasi akuntansi, dalam regulasinya, setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diwajibkan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah mencatat, terdapat 25.863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, sekitar 70% di antaranya hidup dan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan. Di Jawa Timur, menurut data Dinas Kehutanan luas kawasan hutan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 berdasarkan Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan adalah seluas 1.361.332,71 Ha.

Wilayah hutan memiliki banyak fungsi, satu diantaranya adalah digunakan sebagai lahan/hutan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehutanan Provinsi Jawa Timur merupakan entitas yang diberi amanat untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan di bidang perhutanan Jawa Timur sesuai dengan rencana pembangunan dan koridor yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Kehutanan memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder). Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu meliputi masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, donator, swasta, serta pemerintah pusat/daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi segala aset (uang dan barang) yang dapat diakui sebagai milik daerah dan hak/kewajiban daerah yang dapat dicatat/dinyatakan dalam satuan moneter. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam PP No.58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### 2.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah satu bidang ilmu akuntansi bagi instansi pemerintahan. Definisi akuntansi pemerintahan sebagai berikut :

Accounting Principles Board (1970) menyatakan "*Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, especially of a financial nature of the economic entity which is intended to be useful in making economic decisions – in making choices that reason among the various alternative courses of action*".

Abdul Halim (2008:143) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan.

### 2.3. Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan standar akuntansi pemerintahan mengikuti basis akuntansi yang ada. Sebagaimana standar yang lain, standar akuntansi dengan tujuan menetapkan waktu yang tepat untuk mengakui dampak dari transaksi untuk tujuan pelaporan keuangan disebut sebagai basis akuntansi. Basis akuntansi yang sering diketahui hanya ada dua, yaitu basis kas dan akrual. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa variasi dan modifikasi dari keduanya. Pada umumnya perkembangan tersebut dibagi menjadi empat macam yaitu basis kas (*cash basis*), basis kas yang dimodifikasi (*modified cash*), basis akrual (*accrual basis*), dan basis akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*). Pembagian ini pun tidak bersifat mutlak.

Di Indonesia, penerapan sistem tersebut ada yang berkembang menjadi basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang diregulasikan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 pada pengantar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) paragraf 11 sebagai bentuk penyesuaian terhadap peralihan dari basis kas ke basis akrual.

1. Basis Kas (*Cash Basis*). Pada basis kas, pengakuan dilakukan saat suatu transaksi memengaruhi kas, yaitu pengakuan pendapatan dilakukan saat kas diterima dan pengakuan belanja saat kas keluar. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan cara membandingkan kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. Basis kas dalam PP No.71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Definisi basis kas menurut IPSAS: "*Cash basis means a basis of accounting that recognizes transactions and other events only when cash is received or paid*".
2. Basis Akrual (*Accrual Basis*). Pengertian basis akrual menurut Lampiran I.02 PSAP 01 paragraf 8 PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual menurut IPSAS I :  
"*Accrual basis means a basis of accounting under which transaction and other events are recognized when they occur (not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transaction and events are recorded in the accounting record and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenues and expenses*".

Basis Kas Menuju Accrual (*Cash Toward Accrual*). Basis kas menuju akrual adalah basis yang dikembangkan oleh KSAP sebagai penyesuaian peralihan dari penggunaan basis kas menjadi basis akrual. Basis ini diterapkan secara umum sejak tahun 2005 berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun

2010. Dalam basis kas menuju akrual, pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran diakui dan dicatat menggunakan basis kas, sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca dicatat menggunakan basis akrual. Untuk mengakomodir perbedaan tersebut maka cara yang dilakukan adalah dengan memunculkan jurnal ikutan (korolari) yaitu setiap transaksi pada laporan realisasi anggaran yang mempengaruhi posisi neraca maka jurnal yang harus dibuat tidak cukup hanya jurnal pendapatan, belanja, atau pembiayaannya saja, tetapi harus diikuti dengan jurnal mutasi neraca.

#### *2.4. Komponen Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pemerintah*

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Paragraf 14 Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menyatakan bahwa dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

Laporan Pelaksanaan Anggaran :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Finansial :

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **3. Metodologi Penelitian**

#### *3.1. Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis dan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai sebuah fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang dimulai pada tahun anggaran 2015, kemudian secara bertahap mengalami penyempurnaan pada periode 2016 dan 2017. Sesuai dengan tujuannya, pendekatan kualitatif dinilai lebih tepat untuk menjelaskan bagaimana upaya SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan kebijakan baru tersebut.

### 3.2. *Prosedur Pengumpulan Data*

Prosedur pengumpulan data yang tepat sangat penting guna mendukung proses penelitian. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi melalui pertanyaan baik yang disiapkan maupun secara spontan dari responden. Wawancara dilakukan dengan enam orang narasumber yaitu Kasubbag Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan, Operator, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran perwakilan UPT. Alat yang digunakan yaitu buku catatan dan alat perekam suara.

#### 2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lain yang berhubungan dengan subjek penelitian. Prosedur ini dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan cara menganalisis laporan keuangan tahun anggaran 2017 serta hubungannya dengan pedoman penyusunan laporan keuangan.

### 3.3. *Informan Penelitian*

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik key person yaitu informan pangkal yang dapat memberi petunjuk lebih mendalam tentang adanya individu lain dalam masyarakat ataupun keterangan lebih lanjut yang diperlukan, memiliki pengetahuan yang luas, dan kemampuan mengenai berbagai sektor dalam masyarakat atau memberitahu informan lain yang mengetahuinya (Koentjaraningrat 1991:130)

Key person yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yakni Kepala Subbag Keuangan, staff penata laporan keuangan dan operator yang berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada bagian tersebut, dan satu perwakilan bendahara penerimaan dari UPT (Tabel 3.2.)

### 3.4. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis informasi-informasi yang diperoleh dari data primer berupa laporan dan data sekunder. Tahapan yang dilakukan dalam proses analisis yaitu:

1. Reduksi data, mengumpulkan seluruh data yang diperlukan khususnya dokumen peraturan pemerintah, laporan keuangan dan hasil wawancara. Melakukan manipulasi, transformasi, dan mengklasifikasikan data tersebut.
2. Menganalisis hasil temuan dengan pihak informan dengan menggunakan teknik triangulasi data sehingga memberikan pemahaman secara jelas dan valid atas data hasil penelitian.
3. Melakukan verifikasi komponen laporan keuangan terhadap sebagian isi PSAP Akrual dalam PP No.71 tahun 2010.
4. Intepretasi, meliputi pengambilan keputusan dan identifikasi pola. Menulis hasil penelitian sementara untuk menilai apakah hasil yang dibutuhkan sudah mencukupi.
5. Menarik kesimpulan atas hasil analisis serta memberi saran terhadap proses penerapan tersebut.

**Tabel 3.2.**  
**Acuan Wawancara**

| Pertanyaan utama penelitian : Bagaimana SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menerapkan SAP Berbasis Akrual |  |   |
|---|--|---|
| Pelaksanaan:  |  |   |
| 1. Wawancara semi terstruktur secara langsung.  |  |   |
| 2. Alokasi waktu 15-20 menit untuk tiap narasumber.   |  |   |
| No  | Pertanyaan Awal  | Narasumber                                    |
| 1   | Apakah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan SAP berbasis akrual?   | Kasubbag Keuangan                             |
| 2   | Bagaimana Dampak Perubahan peraturan tersebut terhadap tupoksi dan penyusunan laporan keuangan?                            | Semua Narasumber                              |
| 3   | Kendala apa saja yang terjadi dalam proses penerapan peraturan baru tersebut?  | Semua Narasumber                              |
| 4   | Bagaimana sosialisasi dari Pemerintah Provinsi dalam membantu penerapan aturan tersebut?                                   | Kasubbag Keuangan dan Penata Laporan Keuangan |
| 5   | Riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja, apakah saudara mengalami kesulitan dalam menjalankan aturan baru tersebut?      | Semua Narasumber                              |
| 6   | Apakah penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi komputer akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan SAP akrual? | Semua Narasumber                              |
| 7   | Bagaimana perkembangan pelaksanaan SAP akrual pada tahun anggaran setelahnya?  | Semua narasumber                              |
| 8   | Bagaimana cara yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam mengatasi kendala kendala tersebut?                                    | Kasubbag Keuangan                             |
| 9   | Apakah Jumlah dan Kualitas SDM memadai dalam penerapan SAP akrual?   | Kasubbag keuangan                             |

## 4. Analisis dan Pembahasan

### 4.1. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai Entitas Akuntansi mengikuti peraturan-peraturan yang terkait kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Entitas Laporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Database SIBAKU, prosesnya didokumentasikan dalam laporan berupa Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan LPE. Secara administrasi, SKPD menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual adalah mengakui pendapatan, beban aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

Aset Tetap disajikan dengan menggunakan nilai perolehan historis setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Kewajiban memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diukur dengan andal. Pos Kewajiban terdiri dari:

a.) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.200.000.000 yang merupakan pendapatan atas sewa tanah senilai Rp.250.000.000 dengan masa sewa selama lima tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 188/810/KPTS/013/2016.

b.) Utang belanja jasa (Telepon, listrik, air, surat kabar dan multimedia) sebesar Rp. 59.408.600,00

Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dihitung dan dicatat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan memengaruhi ekuitas akhir Neraca. Aset disajikan menggunakan nilai perolehan historis. Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Pada Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas dalam proses penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada pos atau rekening Saldo Anggaran Lebih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan, hal tersebut berbeda dengan laporan realisasi anggaran ketika masih menggunakan basis kas yang mensyaratkan bahwa setiap transaksi pendapatan dan belanja akan berpengaruh pada rekening Kas Umum Negara atau Daerah.



Laporan perubahan ekuitas dinas kehutanan untuk tahun 2016 masih belum sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 sehingga menghasilkan laporan perubahan ekuitas yang tidak terinci dalam penyajian nilai tiap pos/rekening karena masih menyajikan pendapatan dan belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, berbeda dengan tahun 2017 yang telah sepenuhnya menerapkan sebagaimana disyaratkan oleh PP No. 71 tahun 2010 yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi periode sebelumnya dan ekuitas akhir.

Laporan Operasional berbasis akrual mensyaratkan untuk menyajikan pos-pos pokok dalam laporan operasional yang terdiri dari Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional bila ada, Pos Luar Biasa bila ada, dan surplus/defisit-LO. Pada Laporan Operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016 tidak diklasifikasikan secara tersendiri berdasarkan sumbernya sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2017 yang di klasifikasikan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta menyajikan beban operasi sebagai pos tersendiri dan melengkapinya dengan rincian dari setiap aktivitas yang menimbulkan beban sehingga secara akrual, komparasi antara pendapatan dari kegiatan operasional dengan beban operasi menghasilkan surplus/defisit laporan operasional dan pada tahun 2017 sendiri menghasilkan defisit sebesar Rp - 102.900.074.986,20.

#### *4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan*

SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

#### 4.4. Karakteristik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Aspek Riwayat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menunjang pekerjaan. Sebuah jabatan atau fungsi dalam organisasi memiliki kriteria atau standar kualifikasi pendidikan tertentu agar pekerjaan dapat dijalankan dengan tepat.

**Tabel 4.4.**

**Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Jawa Timur**

| No | Nama               | Jabatan                   | Riwayat Pendidikan |
|----|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1  | Anis Mufidah       | Kepala Subbag Keuangan    | S2 Manajemen       |
| 2  | Emy Auliyana       | Penyusun Laporan Keuangan | S2 Akuntansi       |
| 3  | IGM Widyantara     | Operator                  | D3 Perpajakan      |
| 4  | Majianto           | Bendahara Penerimaan      | SLTA               |
| 5  | Sri Sulanjari      | Bendahara Penegeluaran    | S1 Manajemen       |
| 6  | Mochamad Fajarudin | Bendahara Pengeluaran UPT | S1 Ekonomi         |

Sumber : Hasil Wawancara

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pejabat pelaksana memiliki latar belakang ekonomi dan manajemen.

Kepala Subbag Keuangan sebelumnya memiliki latar belakang ilmu kehutanan dan ditempatkan pada jabatan yang berbeda, sehingga saat menjabat Kepala bagian Keuangan dalam masa penerapan SAP akrual yaitu tahun anggaran 2015, beliau mengalami banyak kendala karena tenggat waktu yang singkat sedangkan SAP akrual sudah harus diterapkan pada 2015.

Berdasarkan Hasil wawancara, Pada Bagian bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran, tugas yang dilakukan tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang mendalam sehingga tidak terlalu terdampak dengan perubahan kebijakan akuntansi basis akrual.

Fungsi Penata Laporan Keuangan dan Operator adalah yang bertugas untuk mengumpulkan data dan menyusun laporan keuangan sehingga latar belakang pendidikan

cukup berpengaruh terhadap pekerjaan. Tidak ada kesulitan atas penerapan SAP akrual karena sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang ilmu akuntansi. Sesuai dengan pernyataan dari Kasubbag Keuangan:

“Untuk SDM saya pikir sudah cukup baik khususnya pada bagian Penata laporan keuangan yang memiliki latar belakang ilmu akuntansi.”

#### 4.5. Karakteristik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pengalaman Kerja pada Jabatan

Pengalaman kerja menunjukkan seberapa ahli seseorang melakukan suatu pekerjaan. Semakin lama seseorang bekerja maka keahlian dan ketepatan orang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya akan meningkat.

Semua staff sudah bekerja pada jabatan lebih dari 2 tahun sehingga dapat disimpulkan masing-masing staff sudah terbiasa dan menjalankan pekerjaan dengan basis akrual. Selain itu program pembinaan dan pelatihan SDM juga memberi dampak positif terhadap penerapan SAP Akrual. Sebagian besar pekerjaan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIBAKU, sehingga kendala utama SDM dalam penerapan SAP akrual adalah kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang baru. Pada periode 2016 pelatihan dan sosialisasi dilakukan lebih intens sehingga mempercepat peningkatan kemampuan.

**Tabel 4.5.**

#### **Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Jawa Timur**

| No | Nama               | Jabatan                   | Lama Bekerja pada Jabatan |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | Anis Mufidah       | Kepala Subbag Keuangan    | 5 tahun                   |
| 2  | Emy Auliyana       | Penyusun Laporan Keuangan | 7 tahun                   |
| 3  | IGM Widyantara     | Operator                  | 3 tahun                   |
| 4  | Majianto           | Bendahara Penerimaan      | >10 tahun                 |
| 5  | Sri Sulanjari      | Bendahara Penegeluaran    | 10 tahun                  |
| 6  | Mochamad Fajarudin | Bendahara Pengeluaran UPT | 3 tahun                   |

Sumber : Hasil Wawancara

#### 4.6. Teknologi Informasi

Proses pengumpulan data, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Database SIBAKU, prosesnya didokumentasikan dalam laporan berupa Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan LPE.

Pengelolaan Teknologi Informasi menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung kesuksesan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah adalah aspek pengelolaan teknologi informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks memiliki risiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual.

Pada Periode 2017 Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SIBAKU) sudah baik namun masih perlu penyempurnaan agar pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual di SKPD berjalan lancar.

#### *4.7. Hambatan dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mengalami kendala yang tidak jauh berbeda dengan implementasi dari adanya kebijakan baru oleh pemerintah yaitu terkait proses sosialisasi dari BPKAD serta kurangnya persiapan sehingga waktu jatuh tempo yang singkat dan menambah beban kerja. Selain itu kendala lain yang dihadapi berupa masalah teknologi informasi.

Operator penyusun laporan keuangan mengungkapkan

“Kesulitan dari data manual yang dibuat menggunakan Ms-Excel harus dipindah ke program SIBAKU pada September-Oktober, tapi program belum sempurna sehingga banyak sekali terjadi error. Berikutnya mulai berjalan dengan stabil, masih terdapat bug namun tidak sering dan berjalan.”

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### *5.1. Kesimpulan*

Sesuai dengan uraian pada bab pembahasan, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi SIBAKU yang merupakan aplikasi akuntansi terintegrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang disosialisasikan melalui BPKAD. Laporan keuangan disajikan dengan basis akrual mulai tahun anggaran 2015 dan mendapat penilaian wajar serta sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.
2. Perubahan SAP Akrual berpengaruh terhadap metode dan tugas bagian Kepala Subbag Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan dan Operator. Sedangkan bagian lain pada Subbag Keuangan menilai perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap tugas mereka. Kemampuan SDM dalam penerapan SAP akrual umumnya sudah

baik. Bagian Penyusun Laporan Keuangan dan Operator memiliki pengetahuan yang memadai tentang ilmu akuntansi. Kasubag Keuangan memiliki latar belakang ilmu kehutanan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari basis akrual.

3. Kendala yang dihadapi pada masa awal perubahan kebijakan basis akuntansi adalah kurangnya sosialisasi dari BPKAD, kurangnya jumlah SDM untuk memenuhi peningkatan beban kerja akibat perubahan kebijakan, aplikasi SIBAKU sering mengalami error dan lamanya proses konversi dari data manual ke database SIBAKU yang baru.

## 5.2. Saran

Saran yang disampaikan sebagai hasil dari penelitian ini dalam penerapan SAP Akrual adalah:

1. Persiapan lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penerapan kebijakan baru sebaiknya direncanakan secara matang dan bertahap pada periode sebelumnya untuk menghindari beban kerja yang menumpuk pada batas jatuh tempo aturan baru tersebut.
2. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan, dalam hal ini antara BPKAD dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur termasuk UPT.

## Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- , 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- , 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.